

Karakteristik Kemiskinan dan Penanggulangannya Di Kabupaten Sidoarjo

M. Miftakhur Rizky

Program Studi Ilmu Komunikasi

FISIP Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Email: rizkie.switch@gmail.com

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan fenomena sosial–ekonomi yang tidak hanya melintas batas agama, tetapi juga suku dan kebangsaan. Karakteristik utamanya adalah rendahnya dan terbatasnya aksesibilitas dalam pemenuhan kebutuhan baik pangan, sandang, papan maupun pendidikan, kesehatan, dan hiburan. Fenomena tersebut tentu diperlukan penanganan dengan pendekatan yang sesuai karakteristiknya agar angka kemiskinan yang begitu tinggi menjadi berkurang. Strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang diimplementasikan dalam suatu anggaran oleh pemerintah pusat maupun provinsi dan kabupaten/ kota untuk menurunkan angka kemiskinan dapat dikatakan cukup berhasil. Namun, keberhasilan dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Indonesia selama ini hanya dilihat dari pencapaian target kinerja atau angka-angka agregat kemiskinan yang mengalami penurunan setiap tahun.

Secara teoretis, semakin tinggi alokasi anggaran untuk penanggulangan kemiskinan, semakin efektif kinerja anggaran tersebut untuk menurunkan angka kemiskinan. Karenanya, Fernanda (2002) dan Radin (2006) menyatakan bahwa akuntabilitas anggaran berbasis kinerja dalam penanggulangan kemiskinan dapat dilihat dari 1) penentuan dan pelaksanaan program, 2) aturan yang sesuai dengan proses dan prosedur, dan 3) hasil yang dicapai. Nilai – nilai yang harus dikedepankan dan diwujudkan dalam penanggulangan kemiskinan juga memperhatikan pencapaian yang efektif dan efisien (Peters, 1996; Rievenbark, 2004).

Pembahasan

Dalam perspektif kesejahteraan sosial, kemiskinan mengarah pada keterbatasan individu atau kelompok untuk mengakses jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan-kesempatan peningkatan produktivitas. Keterbatasan individu karena adanya faktor penghambat berupa faktor internal yang bersumber dari si miskin itu sendiri, seperti rendahnya pendidikan dan adanya hambatan budaya. Sedangkan, faktor eksternal berasal dari luar kemampuan seseorang tersebut, seperti birokrasi atau peraturan-peraturan resmi yang menghambat seseorang mendapatkan sumber daya.

Secara sederhana kemiskinan dalam persepektif kesejahteraan sosial dimaknai sebagai kemiskinan yang pada awalnya disebabkan oleh kemiskinan ekonomi, oleh karena terlalu lama dalam kondisi miskin baik karena faktor tidak disengaja, disengaja maupun karena dipelihara menyebabkan efek domino, berupa patologi atau masalah sosial. Sedangkan resiko ketika kemiskinan sudah menjadi masalah sosial adalah selain harus menyelesaikan masalah ekonomi itu sendiri juga mengatasi masalah sosial yang timbul. Contoh munculnya kriminalitas, budaya malas, korupsi, disparitas sosial yang menyebabkan konflik, dan ketergantungan pada pihak lain.

Kemiskinan absolut terjadi apabila tingkat pendapatannya dibawah garis kemiskinan atau sejumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum, antara lain kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan

kapasitas agar bisa hidup dan bekerja. Kemiskinan jenis ini mengacu pada satu standard yang konsisten, tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat /negara. Sebuah contoh dari pengukuran absolut adalah persentase dari penduduk yang makan dibawah jumlah yang cukup menopang kebutuhan tubuh manusia (kira kira 2000-2500 kalori per hari untuk laki laki dewasa).

Kemiskinan relatif adalah kondisi dimana pendapatannya berada pada posisi di atas garis kemiskinan, namun relatif lebih rendah dibanding pendapatan masyarakat sekitarnya. Meskipun kemiskinan yang paling parah terdapat di negara berkembang, ada bukti tentang kehadiran kemiskinan di setiap region. Kemiskinan struktural ialah kondisi atau situasi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pendapatan. Kemiskinan struktural muncul karena ketidakmampuan sistem dan struktur sosial dalam menyediakan kesempatan-kesempatan yang memungkinkan si miskin dapat bekerja.

Penutup

Pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjabarkan karakteristik kemiskinan serta kebijakan dan program penanggulangannya di Kabupaten Sidoarjo. Lokasi penelitian eksploratif ini dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo. Argumentasi dasar yang digunakan karena Kabupaten Sidoarjo memiliki angka kemiskinan paling rendah di Jawa Timur serta pernah mendapatkan penghargaan *pro poor award* dari pemerintah RI pada tahun 2011 dan 2012. Subjek penelitian ini sebanyak tiga puluh orang dengan key informan Wakil Bupati Sidoarjo. Pengumpulan data dilakukan melalui interview kepada seluruh informant.

Referensi:

- Alkire, S., dan Robles, G. (2015). *Multidimensional Poverty Index-2015: Brief Methodological Note and Results*. The Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI).
- Badan Pusat Statistik. (2014). *Indikator Kesejahteraan Rakyat Jawa Tengah 2013*. Semarang: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Data dan Informasi Kemiskinan Jawa Tengah 2013*. Semarang: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Pendapatan Nasional Indonesia, 2010—2014*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2013). Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Kearifan Kemiskinan (P2). Diakses pada 1 Juli 2015, dari <http://bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1488>.
- Bank Dunia. (2015). Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. Diakses pada 20 Juni 2015, dari <http://www.worldbank.org/in/country/indonesia/brief/reducingextreme-poverty-in-indonesia>.
- Belhadj, B., dan Limam, M. (2012). Unidimensional and Multidimensional Fuzzy Poverty Measures: New Approach. *Economic Modelling*, 29, 995-1002. <http://www.dprd-sidoarjo.jab.go.id>. 2013. Pemkab dan DPRD Beda Data Soal Angka Kemiskinan” diakses 4 April 2014.
- Jajang, dkk. (2013). “Analisis Kemiskinan menggunakan Model Panel Spasial Statik”. Dalam *Mimbar*, Vol. 29, No. 2 (Desember, 2013): 195-203 ‘Terakreditasi’ SK Mendikbud, No.040/P/2014, berlaku 18-02-2014 s.d. 18-02-2019. Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung.
- Sanadjihitu S., Abadi T.W., Luluk F. (2015). “Karakteristik Kemiskinan dan Penanggulangannya di Kabupaten Sidoarjo”. *Jurnal MIMBAR*, Volume 31, No.2. Desember 2015. Hal: 495-506. <http://scholar.google.co.id>

